6 Kawanan Rampok Lintas Provinsi Ditembak Tim Opsnal Polres Sijunjung

SIJUNJUNG (IM) – Tim Opsnal Polres Sijunjung melumpuhkan 6 anggota kawanan perampok lintas provinsi dengan timah panas, di pasar ternak daerah Simancung Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sijunjung.

Keenam rampok asal Jambi yang kerap beraksi di Kabupaten Sijunjunh, Sumatera Barat (Sumbar, adalah Edi Lambau, Bute, Rori, Usin, Ode dan Riki Kalbes.

Sebelumnya sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan petugas, usai melakukan aksinya merampok seorang peternak sapi disebuah pasar ternak.

Kelompok rampok asal Jambi ini dikenal sadis. Biasanya modus mereka melakukan pengembosan ban mobil korbannya. Tapi sebelumnya, mereka lebih dulu mengintai siapa yang baru bertransaksi jual beli sapi di pasar ternak itu. Setelah ada target, lalu salah satu dari mereka bertugas mengembosi mobil korban.

Saat korban akan mengganti ban mobilnya yang kempes, saat itulah mereka beraksi menggasak uang korban dari hasil menjual ternaknya.

Kasat Reskrim Polres Sijunjung, AKP Abdul Khadir Jailani mengatakan, komplotan rampok asal Jambi ini sudah lama menjadi target operasi polisi.

"Dari terasangka petugas berhasil mengamankan uang tunai Rp50 juta, 6 unit HP dan 8 kartu ATM hasil rampasan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara," ujar AKP Abdul Khadir Jailani, Selasa (6/4). ● **lus**

1.388 Personel Gabungan TNI-Polri Amankan Sidang Habib Rzieq Shihab

JAKARTA (IM) - Sebanyak 1.388 personel gabungan TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta diterjunkan melaksanakan pengamanan jalannya persidangan Habib Rizieq Shihabdi PN Jaktim, Selasa (6/4).

"Ada 1.388 personel dari TNI, Polri (sebelumnya pekan lalu 1.394 personel). Kami masih memasang barrier di depan dan pembatasan-pembatasan sehingga mengurangi potensi massa," ujar Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan dalam persidangan Habib Rizieq Shihab aparat kepolisian selalu melaksanakan rapat koordinasi pengamanan dari malam sebelumnya.

Untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dalam jalannya persidangan Habib Rizieq, polisi sebelumnya juga selalu melibatkan anggota Brimob, tim K9, dan Jibom Gegana. ● **han**

IDN/ANTARA

SIMULASI PEMBEBASAN BUPATI ACEH BESAR

Personel Satuan perlawanan teror Gegana Brimob Polda Aceh memasuki halaman kantor untuk membebaskan Bupati Aceh Besar Mawardy Ali yang disandera kelompok teroris saat silmulasi perang kota di Jantho, Aceh Besar, Aceh, Selasa (6/4). Latihan perang kota (urban warfare) dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan personel Gegana Brimob dalam menghadapi serta menanggulangi berbagai ancaman teror dan gangguan keamanan daerah.

Densus 88 Antiteror dan PPATK Jalin Koordinasi untuk Mencegah Terorisme

JAKARTA (IM) - Densus 88 Antiteror Mabbes Plri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjalin koordinasi intensif guna mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, koordinasi itu menyasar pada kelompok atau individu yang diduga menjadi pendana dalam kegiatan terorisme di Indonesia.

"Jadi kita sangat intens bekerja sama dengan Densus 88, sama juga Densus 88 juga memberikan informasi kepada kita kalau ada terkait dengan individu terduga teroris," ujar Dian dalam diskusi virtual yang disiarkan kanal YouTube Dhaksinarga TV, Selasa (6/4).

Dian mengatakan, pemerintah dan aparat keamanan selama ini tidak hanya mengejar pelaku tindak pidana terorisme, tetapi juga mengejar para pendana aksi terorisme di Indonesia.

"Jadi upaya kita dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme ini juga dilakukan melalui pemidanaan pendanaan terorisme," kata Dian.

Dian mengatakan, saat ini dunia tengah memasuki era yang semuanya tidak melulu dilakukan secara fisik. Begitu juga dengan tindak terorisme yang acapkali bermula dari penyebaran paham radikalisme di media sosial.

Menurutnya, kompleksitas saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi PPATK dalam membantu pencegahan tindak pidana terorisme. "Ini tantangan sehingga di PPATK sekarang juga harus mengedukasi masyarakat," katanya. ● **lus**

IM/FRANS

MENTERI BUMN BERI PAPARAN DI RAKERNIS BARESKRIM POLRI 2021

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan paparan saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (6/4). Dalam paparannya Menteri BUMN membahas "Transformasi Penegakan Hukum Polri yang Presisi Guna Mendukung PEN".

Kapolri Cabut Surat Telegram soal Larangan Media Siarkan Kekerasan Polisi

Telegram Kapolri soal larangan media siarkan kekerasan polisi sempat menuai kritikan dari bebagai kalangan, termasuk Dewan Pers, karena dianggap berbahaya terhadap kebebasan pers.

JAKARTA (IM) - Polri membatalkan Surat Telegram Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan liputan. Surat telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu sebelumnya diteken Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanggal 5 April 2021.

Telegram berisikan 11 poin tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. Salah satu isinya yaitu melarang media menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Oleh karena itu, media diimbau menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, tetapi humanis.

Namun, pada Selasa (6/4) sore, telegram itu dibatalkan melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat itu ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri.

"Surat Telegram Kapolri sebagaimana referensi nomor empat di atas (surat telegram tentang pelaksanan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik) dinyatakan dicabut/dibatalkan," demikian bunyi telegram tersebut. L

Lewat telegram itu, para kapolda, khususnya kepala bidang humas Polri di seluruh wilayah, agar melaksanakan dan memedomani isi telegram.

Membahaya Kebebsan Pers

Telegram soal pelaksanaan peliputan itu sejak diberitakan mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari organisasi masyarakat sipil Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Mereka menganggap telegram itu berpotensi membahayakan kebebasan pers. Bahkan Dewan Pers pun minta Polri menjelaskan isi telegram Kapolri yang larang media siarkan kekerasan.

Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar menilai Surat Telegram Kapolri bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 dapat membahayakan kebebasan pers. Sebab isi telegram Kapolri itu melarang media untuk menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arognasi dan kekerasan serta mengimbau media untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas tapi humanis.

"Jukrah (petunjuk dan pengarahan) dari surat telegram tersebut berbahaya bagi kebebasan pers karena publik diminta percaya pada narasi tunggal negara," kata Rivanlee melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (6/4).

"Sementara polisi minim evaluasi dan audit atas tindak tanduknya, baik untuk kegiatan luring maupun daring," ujarnya.

Menurut Rivanlee, upaya mendongkrak kepuasan publik terhadap Polri bukan dengan menutup akses dari media. Ia menilai hal yang penting yakni pembenahan institusi secara struktural sampai ke tingkat lapangan.

"Cara ini justru akan membuat publik semakin tidak puas mengingat polisi semakin sentralistik dalam kerja-kerjanya," ujar Rivanlee.

Selain itu, ia juga menyoroti banyak catatan dari penanganan aksi massa yang brutal. Padahal, lanjutnya, publik mengharapkan kehadiran polisi yang humanis.

"Bukan yang suka kekerasan dengan dalih ketegasan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Arif Zulkifli meminta Polri menjelaskan telegram Kapolri terkait kegiatan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Menurut Arif, isi dari telegram tersebut masih belum jelas apakah ditujukan untuk media internal Polri atau media massa secara umum.

"Polri harus menjelaskan telegram tersebut apakah pelarangan tersebut berlaku untuk media umum atau media internal atau kehumasan di lingkungan kepolisian," ujar Arif, Selasa (6/4).

Arif tidak menginginkan ada kebingungan atau salah tafsir dalam mengimplementasikan TR Kapolri tersebut.

"Jangan sampai terjadi kebingungan dan perbedaan tafsir, terutama jika kapolda di daerah menerapkannya sebagai pelarangan media umum," ucapnya.

Untuk internal Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono sebelumnya juga mengatakan, surat telegram tersebut dikeluarkan agar kinerja polisi di seluruh kewilayahan makin baik. Rusdi menegaskan, surat telegram itu ditujukan kepada semua kapolda untuk jadi perhatian kepala bidang humas.

Ia menyatakan, aturan berupa petunjuk arah (jukrah) itu hanya untuk kalangan internal.

"Telegram itu ditujukan kepada kabid humas. Itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah, hanya untuk internal," ujarnya. ● **mar**

Polisi Bakal Suruh Putar Balik Kendaraan yang Nekat Mudik Lebaran

JAKARTA (IM) - Polisi bakal suruh putar balik setiap kendaraan warga yang masih nekat mudik saat lebaran Idul Fitri 1441 H atau Lebaran 2021 mendatang. Tindakan tegas itu akan dilakukan di beberapa titik perbatasan yang telah disiapkan oleh petugas.

Setidaknya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyiapkan 333 titik penyekatan yang tersebar di sepanjang wilayah Lampung hingga Bali.

"(Mekanisme putarbalik) Iya sama (seperti tahun lalu), jadi nanti disekat-sekat. Yang melintas diperiksa, diputarbalikkan," kata Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan saat dihubungi, Selasa (6/4).

Ia menjelaskan, titik-titik check point yang disiapkan oleh aparat kepolisian akan tersebar di beberapa perbatasan wilayah antara Kota dengan Kabupaten. Kemudian juga, terdapat titik penyekatan di jalan arteri atau pun jalan tol.

Nantinya, semua kendaraan akan diputarbalikkan apabila kedapatan oleh petugas. Mereka yang dipersilahkan melintas hanyalah yang memiliki surat tugas atau pun dalam keadaan terdesak.

"Yang boleh jalan itu adalah orang yang dalam keadaan dinas, mendesak, ada surat tugasnya. Kalau dia mungkin orang tuanya sakit keras, atau mau melayat itu ada surat keterangan dari lurah bisa itu," ujar Rudy.

Namun demikian, Rudy tak dapat merincikan lebih lanjut mengenai titik-titik persis lokasi penyekatan yang dipersiapkan nantinya.

Dia hanya memastikan bahwa lokasi penyekatan akan dapat menahan laju arus mudik Idul Fitri 2021 karena mayoritas jalur yang dilewati pemudik akan disekat.

"Dari Lampung sampai Bali saya nggak bisa nyebutin satu-satu, pokoknya tiap antarkota antarkabupaten ada pos sekat. Jadi dari Sumatera mau ke Jawa gak bisa, Jawa Sumatera nggak bisa. Dari Jakarta mau ke Jawa, juga nggak bisa," papar Rudy.

Operasi Keselamatan Jaya

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Keselamatan Jaya 2021 yang berlangsung sejak 12 hingga 25 April. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, operasi tersebut digelar dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai larangan mudik Lebaran di tengah pandemi Covid-19.

"Kenapa disebut Operasi Keselamatan Jaya, karena murni dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan larangan mudik 2021," kata Sambodo kepada wartawan, Selasa (6/4). Sambodo menjelaskan, operasi itu juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan saat berkendara.

"Meningkatkan kepatuhan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan, tertib berlalu lintas, dan menurunkan angka kecelakaan," kata Sambodo.

Karena itu, kata Sambodo, operasi tersebut nantinya akan menyasar kepada para pengendara yang tidak patuh dalam lalu lintas hingga protokol kesehatan.

"Sasarannya kepada seluruh masyarakat yang tidak patuh protokol. Sebanyak 50 persen preemtif, 50 persen preventif," kata Sambodo. ● **lus**

IDN/ANTARA

BANTUAN LOGISTIK KORBAN BANJIR

Sejumlah anggota kepolisian mendistribusikan bantuan logistik dari Polda NTT untuk dibawa ke pulau Adonara di bandara Gewayantana Larantuka, Flores Timur, NTT, Selasa (6/4). Polda NTT memberikan bantuan berupa makanan, terpal, selimut, kebutuhan anak serta wanita dan akan disalurkan secara bertahap ke korban bencana alam di Adonara.

Terungkap, ZA Penyerang Mabes Polri Dapat Pistol dari Eks Narapidana Teroris

JAKARTA (IM) – Senjata airgun yang digunakan teroris Zakiah Aini (ZA) saat menyerang Mabes Polri dibeli dari eks narapidana teroris (nappiter) bernama Muchsin Kamal (MK) alias Imam Muda.

"Benar, yang bersangkutan eks Napiter Jalin Jantho, Aceh tahun 2010," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (6/4).

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menjelaskan, Imam Muda dan ZA sendiri tidak saling kenal satu sama lain.

"Iya betul (ZA membelinya dari MK) tapi keduanya tidak saling kenal," ujar Ahmad terpisah.

Ahmad mengatakan bahwa pelaku teror Mabes Polri itu membeli senjata tersebut dengan cara memesan secara online.

Aksi teror di Mabes Polri diketahui terjadi pada Rabu 31 Maret 2021 pukul 16.30 WIB. Pelaku adalah Zakiah Aini (25) yang merupakan seorangan mahasiswi Drop Out (DO).

Pelaku sempat menembakan enam kali ke arah petugas. Sehingga akhirnya polisi menembak mati langsung pelaku itu.

Zakiah Aini sendiri diketahui Lone Wolf beridiologi ISIS. Hal itu diketahui setelah melakukan pendalaman. ● **lus**

BNN Musnahkan Ladang Ganja Seluas 9 Hektare di Lhokseumawe

JAKARTA (IM) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama instansi terkait melakukan operasi pemusnahan lading ganja di Lhokseumawe, Aceh Utara. Adapun luas ladang ganja yang dimusnahkan 9 hektare.

"Badan Narkotika Nasional bersama instansi terkait, Pemda, Kejaksaan, Bea-Cukai, Kepolisian, dan TNI, dipimpin Kepala BNN Petrus Goloses telah melakukan operasi pemusnahan ladang ganja di Lhokseumawe, Aceh Utara," kata Direktur Pemberantasan BNN Arman Depari lewat keterangan tertulis, Selasa (6/4).

Arman mengatakan berat ganja yang yang didapat dari hasil operasi ini adalah 25 ton. Terhadap barang tersebut dilakukan pembakaran di lokasi penemuan.

"Lahan ganja yang ditemukan 9 ha dengan berat basah kurang lebih 25 ton. Ganja yang ditemukan, dicabut, dipotong, dan dibakar di tempat (TKP)," ujar Arman.

Arman menyampaikan saat ini pihaknya masih mencari tersangka pemilik kebun ganja tersebut dan barang bukti yang ada.

"Saat ini operasi masih berlanjut untuk mencari dan menemukan tersangka dan barang bukti yang lain," kata Arman. ● **lus**